

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Hal ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik ke arah yang lebih baik lagi dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Pembangunan juga merupakan suatu upaya terprogram yang dilaksanakan secara terus menerus guna mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia baik lahir maupun batin (Yudik Prayetno, 2013). Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah, menuntut adanya pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan manusia dengan memperhatikan faktor-faktor fisik dan nonfisik. Faktor fisik berupa keadaan iklim, relief, luas wilayah, sumber daya alam atau tanah yang subur dan faktor non fisik seperti jumlah penduduk, kondisi ekonomi dan lain sebagainya.

Pembangunan di Indonesia, dilakukan secara terus-menerus dan bertahap kearah kemajuan dan perbaikan seluruh aspek kehidupan bernegara. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia sudah barang tentu tidak akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditargetkan tanpa

dibarengi oleh perumusan kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional yang jelas.

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan peran pemerintah untuk mengembangkan pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pengembangan wilayah pemerintah melaksanakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 bahwa pada hakekatnya otonomi daerah merupakan pembagian atau distribusi kewenangan yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dengan kebijakan desentralisasi. Konsep power sharing dilakukan oleh pemerintah mengingat luasnya wilayah negara yang harus dikelola dan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola serta mengembangkan potensi yang dimiliki.

Potensi wilayah merupakan sumber daya yang terdapat disuatu wilayah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Secara umum, perkembangan wilayah dapat dilihat dari potensi yang dimiliki oleh wilayah. Perbedaan potensi antar wilayah juga mengakibatkan adanya kesenjangan pemerataan dan ketimpangan, hal ini juga berdampak pada disparitas prasarana dan sarana yang terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan. Semua itu dipengaruhi oleh keadaan alam dan manusia yang ada untuk mengelola semua potensi wilayah tersebut. Untuk itu dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah seharusnya pemerintah daerah lebih memaksimalkan segala aspek-aspek yang ada untuk mendukung kelancaran pembangunan sehingga masyarakat lebih sejahtera dengan

program pemerintah untuk memperluas lapangan usaha dengan melakukan stimulus kepada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) agar dapat berkembang dan bertahan dari produk-produk luar.

Masalah perkembangan pada suatu wilayah ditandai dengan adanya perubahan berbagai karakteristik serta gejala lain yang ada disekitar wilayah tersebut. Perbedaan tersebut diantaranya dalam hal produk, penggunaan lahan serta sarana dan prasarana yang akan melengkapi kehidupan masyarakat melalui penyediaan fasilitas di dalamnya. Secara umum perkembangan di Sumatera Utara masih memerlukan perhatian terutama pada daerah di pantai barat yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang baik dibanding dengan pantai timur. Fenomena ini dikarenakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera terkonsentrasi pada pantai timur.

Dalam perkembangan suatu wilayah tantangannya adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana suatu daerah dengan meyerasikan laju pertumbuhan untuk mengurangi kesenjangan, tingkat kesejahteraan dan kemakmuran antar wilayah di provinsi Sumatera Utara. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan serta memperluas jangkauan pelayanan dasar. Penyediaan fasilitas yang dibutuhkan harus sesuai dengan keadaan jumlah penduduk. Apabila fasilitas yang diperlukan tersebut mengalami kekurangan maka akan terjadi kekacauan untuk mendapatkan fasilitas yang ada sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang optimal.

Pertumbuhan penduduk dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk secara alami dan arus migrasi. Pertumbuhan penduduk tanpa disertai kontrol untuk

mengatur jumlah perkembangan yang diinginkan hanya akan menimbulkan problem sosial dan ekonomi penduduk. Pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ketahun memerlukan pertumbuhan investasi, sarana dan prasarana. Hal ini tentu saja masalah yang rumit bagi pemerintah setempat dalam usaha pembangunan dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan penduduk (Sadyohutomo,2008).

Tanah Jawa merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dikenal sebagai *Tanah Jawa* karena semenjak penjajahan Hindia Belanda, Tanah Jawa menjadi salah satu kawasan residen dari Sumatera Timur. Para pekerja perkebunan teh, karet dan kebanyakan dari pekerja kebun adalah transmigran dari Jawa. Penduduk Kecamatan Tanah Jawa pada tahun 2020 berjumlah 54.900 jiwa dengan jumlah penduduk usia sekolah mencapai 20.696 jiwa (Kantor Camat Tanah Jawa, 2021). Dengan besarnya jumlah penduduk usia sekolah maka pemerintah harus mengoptimalkan segala fasilitas pendidikan yang dimulai dari Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas yang tersebar di 20 desa dengan luas wilayah 174,33 Km².

Keadaan sarana pendidikan tahun 2021 pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Tanah Jawa yaitu terdapat 3 sekolah yang terdiri dari 1 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Peningkatan terhadap layanan harus ditingkatkan mengingat pendidikan kebutuhan primer dalam pengembangan sumber daya manusia guna mensejahterakan penduduk dalam persaingan global, hal ini mendorong pemerintah harus mengevaluasi pendidikan dengan cara penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan yang sudah ada untuk mutu pendidikan di Kecamatan Tanah Jawa.

Menurut Mutu'ali (2000), tentang sarana dan prasarana pendidikan bahwa pada setiap 4.800 penduduk harus ada 1 sekolah menengah atas tetapi di Kecamatan Tanah Jawa belum dapat terealisasi oleh pemerintah setempat. Berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2020 seharusnya tersedia 11 unit SMA tetapi yang ada hanya 1 unit sekolah negeri. Apabila fasilitas yang ada belum memadai terus berlangsung pada pelayanan pendidikan maka akan berdampak pada jumlah siswa yang diterima oleh sekolah sehingga penduduk yang ingin melanjutkan ke tingkat SMA harus mencari sekolah keluar dari Kecamatan Tanah Jawa dan memaksa sekolah harus menampung melebihi kapasitas yang ada sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Selain sarana dan prasarana pendidikan, hal yang perlu di perhatikan yakni sarana dan prasarana kesehatan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan drajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang mulia ini diperlukan upaya kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan secara berkesinambungan yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan hingga pemulihan, serta rujukan yang membutuhkan sarana/fasilitas kesehatan.

Upaya untuk meningkatkan drajat kesehatan masyarakat telah banyak dilakukan oleh pemerintah selama ini, yakni melalui penyediaan fasilitas kesehatan.

Disadari bahwa keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa. Dengan penduduk yang sehat, pembangunan di harapkan dapat berjalan dengan lancar. Kecamatan Tanah Jawa memiliki 1 rumah sakit swasta namun juga memiliki fasilitas lainnya yang berada di beberapa Desa/kelurahan.

Penyediaan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Tersedianya sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan menyangkut penyebaran dan akses atau kejangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dengan bertambahnya populasi dan kegiatan masyarakat Kecamatan Tanah Jawa, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun yaitu: pada tahun 2019 jumlah penduduk berjumlah 48.004, pada tahun 2020 penduduk berjumlah 54.900 dan pada tahun 2022 penduduk kecamatan tanah jawa berjumlah 55.495. Dengan bertambahnya jumlah penduduk secara otomatis kegiatan masyarakat juga bertambah seperti penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan lainya. Serta dengan jumlah penduduk yang bertambah tiap tahunnya maka pemerintah harus menambah atau memperbaiki fasilitas (pendidikan, kesehatan) agar sesuai dengan jumlah penduduk dan tidak terjadi ketimpangan. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan belum memenuhi dan kurang optimalnya sarana kesehatan di setiap Puskesmas mendorong masyarakat harus pergi ke daerah sekitar seperti Desa Balimbingan untuk melakukan pengobatan karena di desa mereka belum terdapat puskesmas.

Dengan minimnya sarana dan prasarana baik pendidikan maupun kesehatan, masyarakat menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Selain itu, akses jalan untuk mendapatkan fasilitas tersebut belum memadai sehingga siswa yang ingin bersekolah maupun masyarakat yang akan melakukan pengobatan memerlukan waktu yang cukup lama. Berdasarkan latar belakang maka perlu di analisis ketersediaan sarana dan prasarana sosial di Kecamatan Tanah Jawa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan diantaranya :

1. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang belum merata di setiap desa.
2. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang masih terbatas di setiap desa.
3. Jarak desa yang cukup jauh dari sarana dan prasarana
4. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang menjadi pembatasan masalah adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang ada di Kecamatan Tanah Jawa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka di dalam penelitian ini dirumuskan masalahnya dalam bentuk pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Tanah Jawa?
2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Tanah Jawa?
3. Bagaimana keterjangkauan masyarakat terhadap sarana dan prasarana (pendidikan, kesehatan) di Kecamatan Tanah Jawa?

E. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Tanah Jawa.
2. Untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Tanah Jawa.
3. Untuk mengetahui keterjangkauan masyarakat terhadap sarana dan prasarana (pendidikan, kesehatan) di Kecamatan Tanah Jawa.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun khususnya Pemerintahan di Kecamatan Tanah Jawa dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan pelayanan fasilitas sosial.

2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk penulisan karya ilmiah.
3. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian lain dibidang sarana dan prasarana sosial.



THE
Character Building
UNIVERSITY